

# Tionghoa dan Persoalan Sejarah

Bagian Terakhir  
dari Dua Tulisan

SEBAGAI tambahan, ada dua gedung tembakau di Kedu yang baru saja terkena aneksasi, dimana tembakau yang diserahkan ditimbang, diperiksa, dan ditaksir guna menentukan pembayaran bea cukai sebelum diekspor di pantai utara. Kelak, pengurusan gerbang tol oleh Belanda menyulut keresahan sosial di pedesaan makin membesar.

Sejarawan Peter Boomgaard (2004) menegaskan bahwa pungutan pintu tol dan pajak pasar pasti merupakan penghalang lain lagi bagi usaha skala besar dan tahan lama apa pun dalam spesialisasi pertanian yang dilakukan kaum petani. Dengan demikian, tidak ada perangsang apa pun untuk meningkatkan produksi pertanian melebihi tingkat subsistensi. Pedagang dan petani Jawa bertambah susah karena tidak ada ketentuan pasti perihal pajak yang dibayar. Mereka membawa bahan pangan umum dan hasil pertanian seperti

Oleh : Heri Priyatmoko

buah dan sayuran hasil memetik di pekarangan. Retribusi semua barang ini sepenuhnya diserahkan kepada para penjaga gerbang tol. Ulah penjaga gerbang tol sulit dibendung, sebab mereka sendiri adalah penyewa kesekian gerbang tol dari beberapa perantara. Mereka juga butuh uang tak sedikit untuk menutup pengeluarannya.

Pemerintah kolonial menyadari betul pengaruh buruk yang ditimbulkan dari sistem pajak gerbang tol yang menggila itu. Mereka sekuat tenaga berupaya membatasi pengaruhnya sebelum tahun 1825. Inggris menghapus bandar di sepanjang Bengawan Solo pada 1814, dan Belanda mengikuti jejak itu di Kedu tahun 1824. Langkah tersebut ditempuh selepas menerima laporan dari suatu tim yang dipimpin Residen Surakarta dan Residen Yogyakarta. Tim ini menganjurkan Gubernur Jenderal supaya menghapus semua pos bea cukai di wilayah ini.

Tim itu mengakhiri laporannya dengan suatu ramalan yang sangat mengerikan: "Kami berharap agar mereka (orang-orang Jawa) tidak akan

sampai terbangun dari keadaan tidur nyenyaknya ini, karena kami memperhitungkan, sebagai sesuatu yang sudah pasti, bahwa kalau gerbang-gerbang tol tetap diizinkan terus melakukan kegiatannya, maka waktunya tidak akan lama lagi, pada saat orang-orang Jawa itu akan bangkit dengan cara yang mengerikan."

Detik-detik ketuban Perang Jawa mau pecah, pedesaan di Jawa mulai tidak tentram. Ibarat api dalam sekam, tinggal mencari pematiknya. Orang hidup saling curiga dan menebar teror. Banyak gerombolan bersenjata beroperasi tanpa tuntutan hukum. Kegiatan harian para petani juga diawasi ketat mata-mata para penjaga gerbang tol yang ditempatkan di setiap desa dan jalan desa supaya warga tak bisa menghindari wajib bayar pajak. Bahkan, orang yang telah tutup usia sekalipun dalam perjalanannya ke kuburan terbebani pajak.

Bukan cuma melintasi gerbang tol saja, walau tidak membawa barang yang dipajaki, dapat menyebabkan pelancong terkena "pajak bokong".

Istilah Jawa ini artinya, ke mana pun kita pergi, pantat atau bokong tak mungkin ditinggal.

Ahli sejarah pedesaan, Suhartono (1991) membeberkan bahwa aneka pajak yang dibebankan ini menjadi pemacu lahirnya gejala sosial. Ditambah pula hidup mereka kian menderita dan serba kekurangan gara-gara upah kerja yang diberikan oleh pihak perusahaan perkebunan sudah tidak layak untuk menopang hidup.

Kisah di atas telah lama berlalu dan menjadi bagian dari memori sejarah bangsa Indonesia. Kita tidak ingin sejarah kelam ini berulang. Maka, dibutuhkan kearifan masa lalu sebagai bahan refleksi bersama. Tak perlu mengagung-agungkan atau memprioritaskan suatu kelompok sosial tertentu sebab bakal memicu kecemburuan sosial. Sekali lagi, bukan berniat mengukit persoalan sejarah, namun menghadirkannya kembali untuk kaca benggala warga Indonesia lintas etnis dan lintas sosial. Merawat kedamaian di hati dan di ruang sosial. \*\*\*

**Heri Priyatmoko,**

*Dosen Sejarah, Fakultas Sastra,  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta*